

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

SKRIPSI

**HAIGUSTINA
NIM : 18622064**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**HAIGUSTINA
NIM : 18622064**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

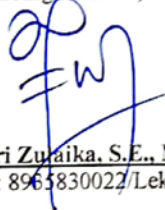
Oleh :

NAMA : HAIGUSTINA

NIM : 18622064

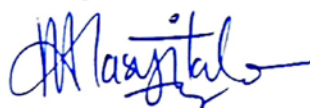
Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDK : 8965830022/Lektor

Pembimbing Kedua,



Masvitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN : 1010109101/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.CAO
NIDN : 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : HAIGUSTINA
NIM : 18622064

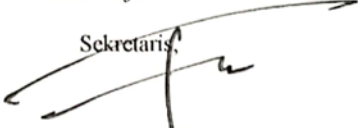
Telah Dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tiga Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,


Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA
NIDK : 8935830022 / Lektor


Sekretaris,


Fauzi, S.E., M.Ak
NIDK : 8928410021 / Asisten Ahli

Anggota,


Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak
NIDN : 1001089501 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua

Charly Marinda, S.E., M.Ak.Ak, CA
NIDN. 109127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Haigustina
NIM : 18622064
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,17
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 13 Januari 2023

Penyusun,



HAIGUSTINA

NIM : 18622064

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya untuk memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku terkasih dan tersayang Mamak R.Hainun dan Bapak M.Djunaidi (Alm) yang selalu ada serta begitu banyak kebahagiaan dan cinta yang telah diberikan, terutama mamak yang telah berusaha semampunya untuk mengkuliahi anaknya. Segala perjuangan skripsi ini saya persembahkan pada kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mamak dan bapak bahagia.

Kuucapkan terimakasih kepala keluarga besarku juga yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Kuucapkan terimakasih juga kepada teman-temanku yang selalu menjadi pendengar keluh kesahku, membantu segala sesuatu dalam skripsi ini dan menemani disaat susah maupun senang. Terimakasih atas dukungannya.

HALAMAN MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(QS.Al-Baqarah: 286)

“ Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar.”

(QS.Ar-Ra'd: 11)

“ Jangan biarkan orang lain menarikmu pada badai kemurungan, bila tanganmu lebih kuat untuk menarik mereka pada kebahagiaan. Namun bila kau lemah atas keduanya, lepaskan saja dan pergi.”

“ Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, jadilah diri sendiri versi terbaik dan akan tumbuh lebih indah.”

“ Semua akan baik – baik saja pada akhirnya, jika tidak baik –baik saja bukan berarti itu akhirnya.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak, CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak, CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak, CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak.CAO selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.

6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Ibu Masyitah As Sahara, S.E. M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada Bapak Ardi Nur Ihsan, S.E selaku Kepala Bidang Anggaran dan staf BPKAD Kabupaten Natuna yang sudah membantu untuk penelitian skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretaris Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
10. Kepada kedua orang tuaku Mamak R.Hainun dan Bapak M.Djunaidi (Alm) yang sangat dicintai yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada keluarga besarku yang sangat aku sayangi dan telah mendukung serta memberikan semangat pada perkuliahan selama ini.
12. Untuk sahabat-sahabat ku tersayang Lisa Ardiani, Estariani Iskandar, Muhammad Ilham Fikri, Puspita Agustina, Sukma Apriilia Saputri, Raja Sella Mayliza, Alma Cera, Raja Rahmadoni Riza Sedran, Benaranggi Evrana Oktaviari, Fitri Rahmadani, Frinica Exlesia dan Esa Hikma Nuriilah yang telah membantu,

menyemangati, mendengarkan segala keluh kesah selama ini dan mau direpotkan dalam pembuatan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 dan teman kelas Akuntansi Pagi 2 yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 11 Oktober 2022

HAIGUSTINA
18622064

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | |
| HALAMAN MOTTO | |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| <i>ABSTRACT</i> | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Kegunaan Ilmiah..... | 6 |
| 1.5.2 Kegunaan Praktis | 6 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 7 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|---|
| 2.1 Tinjauan Teori..... | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan | 8 |
| 2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah | 9 |

| | | |
|--------|--|----|
| 2.1.3 | Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 10 |
| 2.1.4 | Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 12 |
| 2.1.5 | Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .. | 13 |
| 2.1.6 | Pengertian Laporan Realisasi Anggaran | 15 |
| 2.1.7 | Manfaat Laporan Realisasi Anggaran | 17 |
| 2.1.8 | Definisi Kinerja Keuangan | 18 |
| 2.1.9 | Pengukuran Kinerja | 19 |
| 2.1.10 | Tujuan Penilaian Kinerja | 21 |
| 2.1.11 | Tahap – Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan | 22 |
| 2.1.12 | Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 24 |
| 2.1.13 | Rasio Keuangan | 24 |
| 2.2 | Kerangka Pemikiran | 30 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu | 31 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 3.1 | Jenis Penelitian | 37 |
| 3.2 | Jenis & Sumber Data | 37 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.4 | Teknik Analisis Data | 39 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1 | Hasil Penelitian | 40 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Objek Penelitian | 40 |
| 4.1.2 | Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna | 43 |
| 4.1.3 | Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna | 57 |
| 4.2 | Pembahasan | 59 |
| 4.2.1 | Penyajian Data | 59 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 4.2.2 Hasil Wawancara | 79 |
|-----------------------------|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 83 |
| 5.2 Saran | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

| No. | Judul Tabel | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Data Tahun 2016-2020 | 4 |
| 2. | Kriteria Pengukuran Efektivitas | 26 |
| 3. | Laporan Realisasi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 | 60 |
| 4. | Laporan Realisasi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 | 61 |
| 5. | Laporan Realisasi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 | 62 |
| 6. | Laporan Realisasi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 | 63 |
| 7. | Laporan Realisasi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 | 64 |
| 8. | Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016-2020 | 68 |
| 9. | Kriteria Pengukuran Efektivitas | 69 |
| 10. | Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabuapten Natuna Tahun Anggaran 2016-2020 | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul Gambar | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | Kerangka Pemikiran..... | 30 |
| 2. | Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna..... | 44 |
| 3. | Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016-2020 | 71 |
| 4. | Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016-2020..... | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016-2020 |
| Lampiran 2 | Surat Pernyataan Izin Penelitian |
| Lampiran 3 | Cek Plagiasi |

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Haigustina, 18622064. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
haigustina@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan realisasi anggaran mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis data menggunakan rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio efektifitas PAD pada tahun 2016 sebesar 96,58%, tahun 2017 sebesar 95,10%, tahun 2018 sebesar 89,80%, tahun 2019 sebesar 57,29% dan tahun 2020 sebesar 73,36%. Untuk rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2016 sebesar 52,20%, tahun 2017 sebesar -20,09%, tahun 2018 sebesar -0,49%, tahun 2019 sebesar 39,38% dan tahun 2020 sebesar -31,42%. Rasio pertumbuhan PAD tahun 2016 sebesar 51,69%, tahun 2017 sebesar 28,62%, tahun 2018 sebesar -30,20%, tahun 2019 sebesar 17,65% dan tahun 2020 sebesar -8,66%. Rasio pertumbuhan belanja operasi tahun 2016 sebesar 17,38%, tahun 2017 sebesar 2,38%, tahun 2018 sebesar -11,29%, tahun 2019 sebesar 28,82% dan tahun 2020 sebesar -9,01%. Rasio pertumbuhan belanja modal pada tahun 2016 sebesar 68,23%, tahun 2017 sebesar 7,53%, tahun 2018 sebesar -43,67%, tahun 2019 sebesar 98,72% dan tahun 2020 sebesar -35,50%.

Dapat disimpulkan dari kriteria pengukuran efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2019 dan 2020 tidak efektif. Untuk rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2017, 2018 dan 2020 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA

Dosen Pembimbing 2 : Masyitah As Sahara, S.E., M.Si

ABSTRACT

Analysis Of Budget Realization Reports In Measuring The Financial Performance Of The Natuna District Government

*Haigustina, 18622064. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
haigustina@gmail.com*

The study aims to determine how the budget realization report reflects the financial performance of the local government of Natuna regency in 2016-2020. The method used in study is qualitative, the type of data used is primary data and secondary data, and data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis method.

Based on data analysis using effectiveness ratio and growth ratio. The results of this study show that the PAD effectiveness ratio in 2016 was 96,58%, in 2017 it was 95,10%, in 2018 it was 89,80%, in 2019 it was 57,29% and in 2020 it was 73,36%. The revenue growth ratio in 2016 was 52,20%, in 2017 it was -20,09%, in 2018 it was -0,49%, in 2019 it was 39,38% and in 2020 it was -31,42%. The PAD growth ratio in 2016 it was 51,69%, in 2017 it was 28,62%, in 2018 it was -30,20%, in 2019 it was 17,65% and in 2020 it was -8,66%. The operating expenditure growth ratio in 2016 it was 17,38%, in 2017 it was 2,38%, in 2018 it was -11,29%, in 2019 it was 28,82% and in 2020 it was -9,01%. The capital expenditure growth ratio in 2016 was 68,23%, in 2017 it was 7,53%, in 2018 it was -43,67%, in 2019 it was 98,72% and in 2020 it was -35,50%.

It can be concluded from the criteria for measuring the effectiveness of the PAD of the Natuna Regency government in 2019 and 2020 that it is not effective. For the Natuna Regency government's growth ratio in 2017, 2018 and 2020 is negative growth because it tends to decrease.

*Keywords : Budget Realization Report, Financial Performance, Effectiveness ratio
and Growth Ratio*

Supervisor 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA

Supervisor 2 : Masyitah As Sahara, S.E., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan sektor publik merupakan laporan keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan organisasi sektor public. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dipercaya dan tidak mengandung unsur manipulasi (Sujarweni, 2015).

Menurut Ratmono (2017) secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, untuk alat akuntabilitas publik dan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus membuat komponen - komponen laporan keuangan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD adalah pendapatan-LRA, belanja dan surplus atau defisit-LRA. Sedangkan unsur-unsur yang tidak dapat disajikan adalah transfer, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Ketiga unsur tersebut tidak dapat disajikan karena transfer dan pembiayaan merupakan kegiatan anggaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh SKPKD, sedangkan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih surplus atau defisit dengan pembiayaan neto.

Menurut Nurfadillah (2018) tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai

pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, ada beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu, rasio efektifitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas (keserasian), rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan realisasi pendapatan yang diterima, rasio keserasian atau aktivitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007), dan rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan instansi dalam mempertahankan posisinya pada perkembangan ekonomi secara umum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis rasio untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, yaitu rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Natuna bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai penyelenggara perencanaan pendapatan asli daerah, pendapatan dan belanja daerah, yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangannya apakah Pemerintah Kabupaten Natuna telah merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah secara efektif dan apakah pendapatan asli daerah, pendapatan dan belanja daerah mendapatkan pertumbuhan secara positif. Hal ini yang menarik peneliti dalam melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Natuna.

Berikut presentase data Efektivitas PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Data Tahun 2016-2020

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah |
|-------|------------------------|
| 2016 | 96,58% |
| 2017 | 95,10% |
| 2018 | 89,80% |
| 2019 | 57,19% |
| 2020 | 73,36% |

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2016-2018 cukup efektif karena mencapai angka diatas 80%, Kecuali pada tahun 2019-2020 tidak efektif hanya mencapai 57,19% dan 73,36%.

Dengan ini maka penulis mencoba mengangkat judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna. “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut “ Bagaimana Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dari tahun 2016-2020? “.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup yang terlalu lebar sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya berfokus untuk melihat Efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran PAD dan Pertumbuhan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Natuna dengan periode penelitian 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui bagaimana

Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2016-2020 “.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama hal yang terkait didalam topik pada penelitian ini, serta penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam penerapan teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa secara teoritis dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada laporan realisasi anggaran memiliki peran penting dalam menunjang efektifitas dan pertumbuhan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan instansi.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Diharapkan pula penelitian ini dapat menambah teoritis dalam menganalisis yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah serta menambah pengetahuan baru dan wawasan yang berguna.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi kedalam beberapa bab. Sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari tiga bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian, tinjauan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan dan hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Sujarweni, 2019).

Menurut Hery (2018) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini juga berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2019) adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Mahmudi (2019) dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditetapkan SAP Berbasis Akrual yang dimuat di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda berdasarkan SAP yang baru tersebut terdiri dari :

1. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggranannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

3. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir. Bagi pemerintah daerah LP-SAL ini tidak wajib disusun (bersifat opsional).

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CALK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

2.1.4 Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016) pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah.

5. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
6. Ketentuan perundang-undang tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
7. Peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016) karakteristik kualitatif laporan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan seperti memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kelainan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada catatan atas laporan keuangan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunaan. Untuk itu, penggunaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.6 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dari satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. (Suwanda, 2020)

Adapun Laporan Realisasi Anggaran yang dijelaskan dalam PSAP BA 02 paragraf 07 sebagai berikut :

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

- b. Pendapatan transfer, terdiri dari : transfer pemerintah pusat, dana pembangunan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau defisit-LRA

Surplus atau defisit-LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan, dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi.
- b. Pengeluaran pembiayaan, digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

6. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto akan mendekati jumlah surplus atau defisit anggaran, jika manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

7. SiLPA atau SiKPA (Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran)

SiLPA atau SiKPA adalah sisa lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan.

2.1.7 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Manfaat yang didapat dengan dibuatnya laporan realisasi anggaran adalah sebagai *productive value*, yang artinya informasi yang dijadikan gambaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan alat proyeksi kebijakan keuangan dan sebagai *feedback value*, yang berarti informasi dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen.

Menurut Nurfadillah (2018) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2.1.8 Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.

Menurut Sucipto (2013) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2016) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Rudianto (2012) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

2.1.9 Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2019) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur kinerja tingkat 3E, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas untuk memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Menurut Sujarweni (2015) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.

2. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Menurut Sujarweni (2015) informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu:

1. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telag dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisi atau perbedaan) antara kinerja actual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan (*revenue variance*) dan varians pengeluaran (*expenditure variance*).

Setelah dilakukan analisis varians maka tahap berikutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.

2. Informasi non finansial

Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*.

Metode *Balanced Scorecard* merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial. *Balanced Scorecard* dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan non finansial.

2.1.10 Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2013) beberapa tujuan penilaian kinerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai.
2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin.
4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antar atasan dan bawahan.
5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja.

6. Supaya karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu untuk berkembang.
7. Hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.

2.1.11 Tahap – Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018) Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan

Review dilakukan bertujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan

Metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan senga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

Metode umum yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a. *Time Series Analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antarperiode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. *Cross Sectional Approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang atau normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan apa saja dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.1.12 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013).

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2016).

2.1.13 Rasio Keuangan

Menurut Prasetya (2019) analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang

terdekat ataupun potensi daerahnya relatif ama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2012) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan APBD ini yaitu, pihak DPRD, Pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Berikut beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan yaitu, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

2. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

Adapun beberapa kriteria pengukuran efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif pada rumus tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

| Kriteria Efektivitas | Persentase |
|----------------------|------------|
| Sangat Efektif | >100% |
| Efektif | 100% |
| Cukup Efektif | 90%-99% |
| Kurang Efektif | 75%-89% |
| Tidak Efektif | <75% |

Sumber: Penelitian Rindang Arumdari, 2019

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2012

4. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2012) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi presentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah

Menurut Prasetya (2019) rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Arfan Prasetya, 2019

b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan anatar total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah

Menurut Prasetya (2019) rasio ini dapat diketahui dengan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja kodal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanj modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Penelitian Arfan Prasetya, 2019

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Prasetya (2019) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Karina, 2019

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

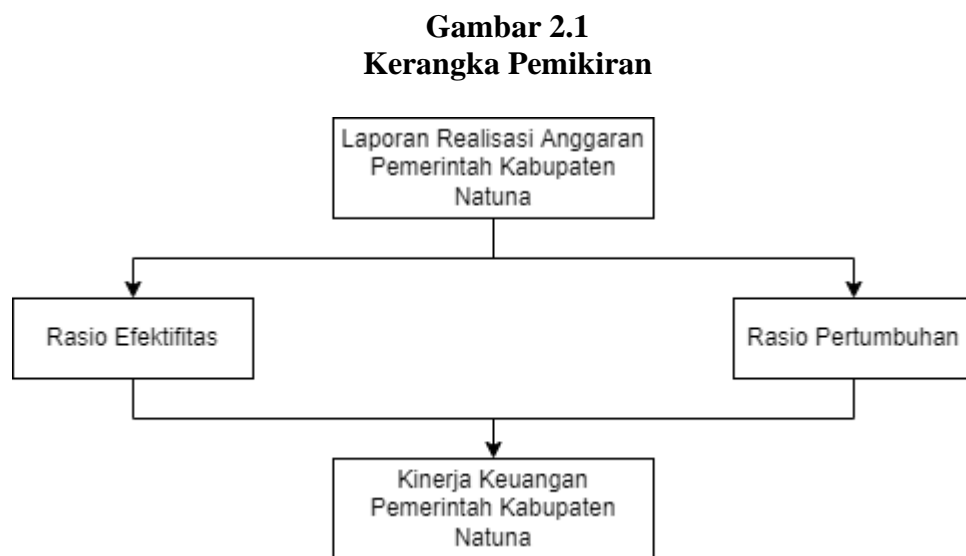
X_{n-1} = Tahun sebelumnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan analisis rasio sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas
2. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran secara sistematis sebagai berikut :



Sumber: Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian,2022

2.3 Penelitian Terdahulu

1. A. Indah Nurfadillah (2018)

(A. Indah Nurfadillah, 2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bone” bertujuan untuk mengetahui analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2014 dari 4,19% menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Pertumbuhan APBD pemerintah daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.

2. Rizka Amanda, Khozin Arief dan Jouzar Farouq Ishak (2021)

(Rizka Amanda et al., 2021) dalam penelitian yang berjudul “Analisis laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada

Pemerintah Kota Bandung” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan mengukur tingkat rasio keuangan. Rasio tersebut adalah rasio efektifitas, rasio efesiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Data yang diperoleh berasal dari dokumen LRA pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio efektifitas penerimaan PAD di Kota Bandung cukup efektif, tingkat rasio efisiensi masih diatas 80% menunjukkan kinerja keuangan kurang efisien, tingkat rasio kemandirian dalam waktu 4 tahun mengalami penurunan dari delegatif menjadi partisipatif, tingkat kesesuaian rasio alokasi dana masih mengutamakan belanja operasional diatas belanja modal, tingkat rasio pertumbuhan keuangan dari tahun 2017-2019 mengalami pertumbuhan positif dan negatif, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2020 semua aspek APBD mengalami pertumbuhan negatif akibat Covid-19.

3. Halkadri Fitra dan Zahro Ilmi Efendi (2020)

(Halkadri Fitra dan Zahro Ilmi Efendi, 2020) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2018 dengan menggunakan data yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode

deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan terhadap data laporan keuangan menggunakan 10 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah 8,04% dengan kategori kemandirian sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah adalah 91,18% dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, derajat desentralisasi keuangan daerah 7,32% dengan kategori derajat desentralisasi sangat kurang. Pertumbuhan realisasi total pendapatan 5,45% dalam kategori yang baik, rasio efektifitas total pendapatan 98,57% berada pada kategori efektif, rasio efektifitas PAD adalah 102,13% berada pada kategori sangat efektif, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04%, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja sebesar 30,77% dan rasio efisiensi total belanja pada tahun 2014-2018 92,75% dalam kategori kurang efisien.

4. Arni Karina & Dephy Noerainy (2019)

(Arni Karina & Dephy Noerainy, 2019) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” bertujuan untuk mengetahui persoalan keuangan daerah yang merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta di mana sampel yang diambil adalah tahun anggaran 2008 – 2012. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik, untuk rasio kemandirian rata – ratanya adalah 55,338% termasuk dalam pola hubungan partisipatif, untuk rasio efektifitas rata – ratanya adalah 104,915% termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi rata – ratanya adalah 92,10% termasuk dalam kriteria kurang efisien, rata – rata rasio aktivitas 75,85% untuk belanja operasi sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14% berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam. Hambatan kinerja keuangan Pemprov DKI yaitu: praktik penyimpangan anggaran pada Pemprov DKI Jakarta, lemahnya kontrol budgeting DPRD DKI Jakarta, dan kuatnya pengaruh politik. Cara Pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012 yaitu dengan : gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta, memperkuat dan memaksimalkan fungsi budgeting DPRD DKI

Jakarta, serta perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.

5. Nur Qamariah (2020)

(Nur Qamariah, 2020) dalam penelitian yang berjudul “*Analysis of Financial Perfomance at the Regional Financial and Asset Agency: Evidence From Regional Government Majene*” bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Majene menggunakan analisis rasio keuangan (analisis rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, fiskal rasio desentralisasi, rasio efesiensi, rasio efektifitas, rasio pendapatan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio harmoni pengeluaran) untuk anggaran tahun 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2012-2017. Diperoleh dari Kabupaten Majene Badan Keuangan dan Aset. Hasil penelitian dengan analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir masih rendah, meskipun pendapatan yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya, namun sebagian besar dana milik pemerintah daerah diprioritaskan untuk operasional operasional kebutuhan belanja sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

6. Ria Steklara Mangindaan, Gregorius N. Masdjojo, dan Wieny Ardriyati (2016)

(Ria Steklara Mangindaan et al., 2016) dalam penelitian yang berjudul “*Analysis of Regional Financial Performance of the District Government South Minahasa year 2012-2014 in the Implementation of the Regional Autonomy*” bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2012-2014. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ditemukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih buruk dalam mengelola LOR. Tapi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola anggaran sudah cukup baik yang dilihat dari tidak ada pengeluaran yang sebenarnya melebihi dianggarkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara deskriptif dan menggunakan analisis, landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3.2 Jenis & Sumber data

Jenis data yang diperoleh dari laporan tahunan pemda Kabupaten Natuna. Sumber data yang diperoleh data primer dan data sekunder, yaitu sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang tersedia.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020).

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2018).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tinjauan pustaka dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur yang ada

berupa buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel terkait, wawancara, observasi, dan situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di BPKAD Kabupaten Natuna.

2. Wawancara

Menurut Yusuf (2014) wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.

Menurut Arikunto (2016) wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang telah dibuat.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan perhitungan pada rasio pertumbuhan dan rasio efektifitas pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020. Berikut langkah-langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengumpulkan data-data keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Melakukan perhitungan analisis rasio keuangan pada tahun 2016-2020.
3. Melakukan perhitungan rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan.
4. Melakukan analisis atas hasil perhitungan rasio keuangan.
5. Menyajikan hasil analisis rasio keuangan yang akan diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.
6. Membuat kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung*. Indonesian Accounting Research Journal, 2(1), 52-62.
- Arikunto, S. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arumdari, R. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fathah, R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Ebbank, 8(1), 33-48.
- Fitra, H., & Ilmi Efendi, Z. (2020). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan*. Menara Ilmu, 14(1).
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Karina, A., & Noerainy, D. (2019). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. AkunNas, 13(1).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Mangindaan, R., S. Masdjojo, G., N. & Ardiyati, W. (2016). *Analysis Of Regional Financial Perfomance Of The District Government South Minahasa Year 2012-2014 In The Implementation Of The Regional Autonomy*. Magelang, 448-463.

- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Prasetya, A. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Di Era Transparansi Di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Qamariah, N. (2020). *Analysis Of Financial Performance At The Regional Financial And Asset Agency: Evidence From Regional Government Majene*. Point Of View Research Management, 1(3), 36-47.
- Rahayu, R. P. (2017). *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Makro Manajemen, 1(1), 55-73.
- Ramli. (2016). *Tujuan Laporan Keuangan*. Vol 15.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rudiyanto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Ruliaty, I. B., & Nurfadillah, A. I. (2018). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 1(1).
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015)*. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 2(3), 343-357.
- Sucipto, (2013). *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis FE Universitas Utara: Medan.
- Sujarweni, V.W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Sujarweni, V.W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

- Sujarweni, V.W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suwanda, D., Elsy, R., & Meiyenti, I. (2020). *Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun (1999). *Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Daerah Kota Batam*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003). *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2004). *Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yusuf, A., M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Haigustina
Jenis Kelamin : Female
Tempat / Tanggal Lahir : Ranai, 4 Agustus 2000
Usia : 22 years old
Alamat : Jl. Bukit Raya Nomor 6 Bt.5 Atas
Agama : Islam
E-mail : haigustina@gmail.com
Nomor *Handphon e*/WA: 082385034453

B. DATA KELUARGA

Ayah Kandung : M.Djunaidi (Alm)
Ibu Kandung : R.Hainun

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

| JENJANG | INSTITUSI | TAHUN |
|---------|--|-----------|
| SD | SD NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR | 2006-2012 |
| SMP | SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR | 2012-2015 |
| SMA | SMA NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR | 2015-2018 |
| S1 | STIE Pembangunan Tanjungpinang Program Studi Akuntansi | 2018-2022 |